

Laporan Kinerja

KPKNL
MALANG MBOIS

2024



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah robbil 'alamin, segala puji kehadiran Allah Subhanallahu Wa Ta'ala. Tuhan yang Maha Esa, yang telah menganugerahkan waktu dan kesehatan, dimana sepanjang tahun 2024 kita menghadapi tantangan berat, yang berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, namun seluruh jajaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang masih diberikan kesempatan memberikan karya terbaik atas capaian kinerjanya sekaligus masih diberikan kepercayaan meraih berbagai penghargaan.

Laporan ini disusun sebagai salah satu implementasi atas azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good governance) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014, setiap instansi pemerintah diwajibkan menyusun Laporan Kinerja (LAKIN) sebagai pertanggung jawaban atas pencapaian tujuan/sasaran strategis instansi. KPKNL Malang sebagai Instansi Vertikal DJKN telah menyusun LAKIN yang berisi berbagai capaian kinerja sebagai hasil pelaksanaan program/kegiatan pada tahun 2024.

Performance KPKNL Malang dinilai berdasarkan pengukuran Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian sasaran strategis sesuai dengan Kontrak Kinerja KPKNL Malang dengan Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur Tahun 2024. Pengukuran kinerja Tahun 2024 berdasarkan hasil capaian kinerja IKU berbasis BSC. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2024 diperoleh rata-rata capaian IKU Kemenkeu Three KPKNL Malang Tahun 2024 sebesar 115,92%. Hasil tersebut merupakan capaian seluruh kinerja KPKNL Malang sesuai dengan Peta Strategi KPKNL Malang Tahun 2024.

Di samping itu, melalui LAKIN yang disusun diharapkan dapat tercipta transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi KPKNL Malang untuk melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang. LAKIN KPKNL Malang Tahun 2024 diharapkan secara eksternal dapat digunakan sebagai media pertanggungjawaban kinerja kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan secara internal dapat digunakan oleh seluruh jajaran KPKNL Malang untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja seiring dengan bertambahnya tantangan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dimasa yang akan datang.

Sebagai simpulan atas semua hal tersebut, kami yakin meski tantangan ke depan semakin beragam dan sulit terprediksi, namun dengan semangat, sinergi, dan disiplin tinggi, KPKNL Malang akan menjadi lebih baik sejalan dengan Nilai-Nilai Kementerian Keuangan. Keseluruhan pencapaian tentu saja tidak lepas dari arahan Pimpinan, peran seluruh pegawai

dan pemangku kepentingan, dimana kata syukur dan terimakasih tidak dapat mewakili andil tersebut, semoga Allah Subhanallahu Wa Ta'ala dapat memberikan balasan yang lebih baik dan keberkahan atas segala upaya yang telah tercurah selama ini.

Salam MBOIS,



Ditandatangani secara elektronik

Ridho Wahyono



IKHTISAR EKSEKUTIF

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Keuangan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menyelenggarakan sebagian tugas Menteri Keuangan dalam merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang sebagai instansi vertikal yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah Jawa Timur mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Laporan Akuntabilitas Kinerja KPKNL Malang tahun 2024 disusun dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil (outcome). Selain itu, Laporan Akuntabilitas Kinerja KPKNL Malang merupakan wujud pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian visi dan misi yang dijabarkan dalam tujuan/sasaran strategis. Laporan Akuntabilitas Kinerja mempunyai fungsi sebagai alat kendali, alat penilai kinerja secara kuantitatif dan perwujudan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi menuju terwujudnya *good governance* yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, kebijakan yang transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan masyarakat.

Penetapan kinerja yang telah ditargetkan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Gambaran penetapan kinerja KPKNL Malang Tahun 2024 dijabarkan dalam melalui 9 Sasaran Strategis dan 20 IKU. Adapun sasaran strategis dengan Indikator Kinerja Utamanya yang harus dicapai tertuang dalam Kontrak Kinerja (KK) Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang dengan Kanwil Jawa Timur. Status capaian IKU Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang tahun 2024 adalah **115,92% (hijau)**.

Pada bidang Pelaksanaan Anggaran, KPKNL Malang mendapatkan apresiasi sebagai: Peringkat I Satuan Kerja Terbaik Kategori Pengguna kartu Kredit Pemerintah dan Peringkat III Satuan Kerja Terbaik Kategori IKPA Satker dengan pagu s.d 5 Milyar untuk Periode Triwulan I 2024, serta Satuan Kerja Terbaik Kategori IKPA Satker dengan pagu s.d 5 Milyar untuk Periode Triwulan II 2024, yang diberikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang.

Pada bidang Lelang, KPKNL Malang meraih penghargaan sebagai Instansi Pendukung Kinerja BC Malang untuk pelaksanaan lelang sarana angkut yang diberikan oleh Kanwil DJBC Jawa Timur II, pada 22 Februari 2024.

Pada bidang Piutang Negara, KPKNL Malang pada 27 Juni 2024 menerima penghargaan dalam program percepatan penyelesaian berkas piutang BPD LH oleh Panitia Urusan Piutang Negara, dimana KPKNL Malang termasuk dalam tiga terbanyak dalam hal penyelesaian BKPN BPD LH.

Dengan tersusunnya laporan akuntabilitas kinerja KPKNL Malang tahun 2024 diharapkan KPKNL Malang semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian visi dan misi dapat dicapai. Selain itu juga diharapkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi sehingga untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i |
| IKHTISAR EKSEKUTIF..... | iii |
| DAFTAR ISI | v |
| BAB I PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. LATAR BELAKANG | 1 |
| B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI..... | 1 |
| C. PERAN STRATEGIS KPKNL MALANG..... | 7 |
| D. SISTEMATIKA LAPORAN | 11 |
| BAB II PERENCANAAN KINERJA..... | 12 |
| A. RENCANA STRATEGIS..... | 12 |
| B. PENETAPAN KINERJA | 14 |
| BAB III AKUNTABILITAS KINERJA..... | 20 |
| A. a. Capaian Kinerja Organisasi..... | 20 |
| A. b. Evaluasi dan Analisis Kinerja..... | 23 |
| 1. Sasaran Strategis (SS) 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan..... | 23 |
| 2. Sasaran Strategis (SS) 2: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa..... | 26 |
| 3. Sasaran Strategis (SS) 3: Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal..... | 27 |
| 4. Sasaran Strategis (SS) 4 : Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien..... | 29 |
| 5. Sasaran Strategis (SS) 5 : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif..... | 29 |
| 6. Sasaran Strategis (SS) 6: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif..... | 32 |
| 7. Sasaran Strategis (SS) 7: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional.... | 33 |
| 8. Sasaran Strategis (SS) 8: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif..... | 34 |
| 9. Sasaran Strategis (SS) 9: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel | 35 |
| 10. Sasaran Strategis (SS) 10: Komunikasi Publik yang Efektif..... | 37 |
| 11. Sasaran Strategis (SS) 11: Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah..... | 37 |
| B. KINERJA LAINNYA..... | 39 |
| C. REALISASI ANGGARAN..... | 42 |
| BAB IV PENUTUP..... | 43 |
| LAMPIRAN I PERJANJIAN KINERJA..... | 46 |
| LAMPIRAN II FORMULIR PENGUKURAN KINERJA..... | 70 |

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara jo. PMK Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, KPKNL Malang mempunyai tugas melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang.

Dalam menjalankan tugas tersebut, KPKNL Malang dituntut untuk melaksanakan dengan akuntabel, efektif, efisien, dan sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.

Salah satu azas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu wujud dari akuntabilitas tersebut adalah penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN).

Laporan Kinerja disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban KPKNL Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsi selama Tahun 2023. Laporan Kinerja merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS, FUNGSI, DAN STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Malang merupakan salah satu instansi vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur. KPKNL Malang beralamat di Jalan S. Supriadi Nomor 157, Kec. Sukun, Kota Malang, Kode Pos 65148.

KPKNL Malang mempunyai tugas yaitu melaksanakan pelayanan di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang negara, dan lelang yang didukung dengan susunan organisasi sebagai berikut:

- a. Subbagian Umum;
- b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara (PKN);
- c. Seksi Pelayanan Lelang;
- d. Seksi Piutang Negara ;
- e. Seksi Pelayanan Penilaian;
- f. Seksi Hukum dan Informasi (HI);
- g. Seksi Kepatuhan Internal (KI); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

a. Subbagian Umum

Mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian, keuangan, tata usaha, rumah tangga, serta penatausahaan, pengamanan, dan pengawasan barang milik negara di lingkungan KPKNL.

b. Seksi Pengelolaan Kekayaan Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan penetapan status penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penghapusan, pemindahtanganan, bimbingan teknis, pengawasan dan pengendalian, penatausahaan dan akuntansi serta penyusunan daftar barang milik negara/ kekayaan negara.

c. Seksi Pelayanan Penilaian

Mempunyai tugas melakukan penilaian yang meliputi identifikasi permasalahan, survei pendahuluan, pengumpulan dan analisa data, penerapan metode penilaian, rekonsiliasi nilai, kesimpulan nilai dan laporan penilaian terhadap obyek-obyek penilaian sesuai dengan ketentuan, serta penyusunan basis data penilaian.

d. Seksi Piutang Negara

Mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang.

e. Seksi Pelayanan Lelang

Mempunyai tugas melakukan pemeriksaan dokumen persyaratan lelang, penyiapan dan pelaksanaan lelang, serta penatausahaan minuta risalah lelang, pembuatan salinan, kutipan, dan

grosse risalah lelang, penatausahaan hasil lelang, penggalian potensi lelang, pelaksanaan lelang kayu kecil PT. Perhutani (Persero) dan penatausahaan bea lelang Pegadaian.

f. Seksi Hukum dan Informasi

Mempunyai tugas melakukan penanganan perkara, pengelolaan dan pemeliharaan perangkat, jaringan, infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi, penyajian informasi dan hubungan kemasyarakatan, implementasi sistem aplikasi, penyiapan bahan penyusunan rencana strategik, laporan akuntabilitas, dan laporan tahunan, penatausahaan berkas kasus piutang negara, serta verifikasi penerimaan pembayaran piutang negara dan hasil lelang.

g. Seksi Kepatuhan Internal

Mempunyai tugas melakukan pemantauan pengendalian intern, pengelolaan kinerja, pengelolaan risiko, kepatuhan terhadap kode etik dan disiplin, dan tindak lanjut hasil pengawasan, serta perumusan rekomendasi perbaikan proses bisnis.

h. Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1. Jabatan Fungsional Pelelang

Mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan lelang dalam lingkungan instansi pemerintah.

2. Jabatan Fungsional Penilai

Mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan di bidang penilaian properti dan/ atau bisnis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Jabatan Fungsional Pranata Keuangan APBN

Mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan keuangan APBN pada satuan kerja kementerian negara/lembaga sesuai kewenangan dan peraturan perundang-undangan.

4. Jabatan Fungsional Penatalaksana Barang Milik Negara

Mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak untuk melaksanakan kegiatan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas Pelayanan di Bidang Kekayaan Negara, Penilaian, Piutang Negara dan Lelang, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang menyelenggarakan

fungsi sebagai berikut:

1. Inventarisasi, pengadministrasian, pendayagunaan, pengamanan kekayaan negara;
2. Registrasi, verifikasi, dan analisa pertimbangan permohonan pengalihan serta penghapusan kekayaan negara;
3. Registrasi, penerimaan berkas, penetapan, penagihan, pengelolaan barang jaminan, eksekusi, pemeriksaan harta kekayaan milik penanggung hutang/penjamin hutang;
4. Penyiapan bahan pertimbangan atas permohonan keringanan jangka waktu dan atau jumlah hutang, usul pencegahan dan penyanderaan PH dan atau Penjamin Hutang, serta penyiapan data usul penghapusan piutang negara;
5. Pelaksanaan pelayanan penilaian;
6. Pelaksanaan pelayanan lelang;
7. Penyajian informasi di bidang kekayaan negara, penilaian, piutang Negara dan lelang;
8. Pelaksanaan penetapan dan penagihan piutang Negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang atau penjamin hutang dan eksekusi barang jaminan;
9. Pelaksanaan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang atau penjamin hutang serta harta kekayaan lainnya;
10. Pelaksanaan bimbingan kepada Pejabat Lelang;
11. Inventarisasi, pengamanan, dan pendayagunaan barang jaminan;
12. Pelaksanaan pemberian pertimbangan dan bantuan hukum pengurusan piutang Negara dan lelang;
13. Verifikasi dan pembukuan penerimaan pembayaran piutang Negara dan hasil lelang; Pelaksanaan administrasi KPKNL Malang.

Struktur organisasi **KPKNL Malang** dapat dilihat pada Bagan Organisasi di bawah ini:

BAGAN ORGANISASI KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG



Sumber : PMK Nomor 170/PMK.01/2012 tanggal 6 November 2012 jo. PMK Nomor 263/PMK.01/2016

Wilayah kerja KPKNL Malang dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara jo. PMK Nomor 263/PMK.01/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 170/PMK.01/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, meliputi:

1. Kota Malang;
2. Kabupaten Malang;
3. Kota Batu;
4. Kota Kediri;
5. Kabupaten Kediri;
6. Kota Blitar;
7. Kabupaten Blitar;
8. Kabupaten Jombang;
9. Kabupaten Tulungagung;
10. Kabupaten Trenggalek;

Dalam menjalankan tugasnya, KPKNL Malang didukung oleh 44 (empat puluh empat) orang pegawai, dengan komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan Jabatan, Golongan, dan Jenis Kelamin

| No. | Unit Kerja | Jmlh Peg. | Jenis Kelamin | | Jabatan | | | | Golongan | | |
|-----|--|-----------|---------------|----|---------|----|------------|------|----------|-----|----|
| | | | L | P | III | IV | Fungsional | Staf | IV | III | II |
| 1 | Kepala Kantor | 1 | 1 | | 1 | | | | 1 | | |
| 2 | Subbagian Umum | 14 | 10 | 4 | | 1 | 1 | 13 | | 11 | 3 |
| 3 | Seksi PKN | 7 | 5 | 4 | | 1 | | 6 | 1 | 6 | |
| 4 | Seksi Piutang Negara | 4 | 2 | 2 | | 1 | | 3 | | 4 | |
| 5 | Seksi Hukum & Informasi | 4 | 2 | 4 | | 1 | | 3 | | 4 | |
| 6 | Seksi Kepatuhan Internal | 3 | 2 | 4 | | 1 | | 2 | | 3 | |
| 7 | Kelompok Jabatan Fungsional Pelelang | 5 | 3 | 2 | | | 5 | | 1 | 4 | |
| 8 | Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah | 4 | 4 | | | | 4 | | | 4 | |
| 9 | Kelompok Jabatan Fungsional Penata Keuangan APBN | 2 | 1 | 1 | | | 2 | | | 1 | 1 |
| | Jumlah | 44 | 30 | 14 | 1 | 5 | 11 | 27 | 3 | 37 | 4 |

*Data per 31 Desember 2024

2. Berdasarkan Pendidikan :

| No. | Unit Kerja | Jmlh Peg. | Tingkat Pendidikan | | | | | | | |
|-----|----------------------|-----------|--------------------|----|-------|----|----|-----|-----|----|
| | | | S3 | S2 | S1/D4 | D3 | D1 | SMA | SMP | SD |
| 1 | Kepala Kantor | 1 | | 1 | | | | | | |
| 2 | Subbagian Umum | 14 | | 1 | 5 | 4 | | 3 | | |
| 3 | Seksi PKN | 7 | | 1 | 3 | 2 | | 1 | | |
| 4 | Seksi Piutang Negara | 4 | | | 2 | | 2 | | | |

| | | | | | | | | | | |
|---|--|----|---|---|----|---|---|---|---|---|
| 5 | Seksi Hukum & Informasi | 4 | | | 3 | 1 | | | | |
| 6 | Seksi Kepatuhan Internal | 3 | | | 2 | 1 | 1 | | | |
| 7 | Kelompok Jabatan Fungsional Pelelang | 5 | | 2 | 3 | | | | | |
| 8 | Kelompok Jabatan Fungsional Penilai Pemerintah | 4 | | 2 | 2 | | | | | |
| 9 | Kelompok Jabatan Fungsional Penata Keuangan APBN | 2 | | | 2 | | | | | |
| | Jumlah | 44 | 0 | 7 | 22 | 8 | 3 | 4 | 0 | 0 |

*Data per 31 Desember 2024

3. Jabatan Fungsional dengan komposisi sebagai berikut :

- a. Pelelang : 5 orang
- b. Penilai Pemerintah : 4 orang
- c. Penatalaksana Barang : 0 orang
- d. Pranata Keuangan APBN: 2 orang

C. PERAN STRATEGIS KPKNL MALANG

Sebagai organisasi yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengelolaan kekayaan negara, penilaian, pengurusan piutang negara, dan lelang, KPKNL Malang memiliki peran strategis sebagai berikut :

a. Melaksanakan Pengelolaan Kekayaan Negara

Sebagai Pengelola Barang Milik Negara, KPKNL Malang memiliki peran strategis dalam pengelolaan kekayaan negara yang bertujuan antara lain:

1. Optimalisasi penerimaan, efisiensi pengeluaran dan efektivitas pengelolaan kekayaan negara terutama dalam utilisasi kekayaan negara;
2. Optimalisasi aset-aset yang terindikasi idle dan pengamanan kekayaan negara baik secara fisik, administrasi dan hukum; dan
3. Berperan penting terhadap upaya pembinaan, pengawasan dan pengendalian dalam penatausahaan dan pengelolaan barang milik negara.

Dalam setiap tahapan pengelolaan Barang Milik Negara, dimulai dari perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan dan pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan dan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, KPKNL Malang senantiasa menekankan pada pentingnya membangun kerja sama yang lebih baik antara Pengelola Barang dengan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Negara.

Membangun dan meningkatkan kemampuan (*capacity building*) dalam pengelolaan Barang Milik Negara pada tataran Kuasa Pengguna Barang akan sangat berpengaruh terhadap keberhasilan pengelolaan Barang Milik Negara sehingga sinergi antara Pengelola Barang dan Kuasa Pengguna Barang menjadi sangat penting dan senantiasa ditingkatkan oleh KPKNL Malang dalam rangka pengelolaan kekayaan negara yang transparan dan akuntabel, meningkatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam pengelolaan Barang Milik Negara, serta penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) yang akuntabel.

— **Pengukuran Penggunaan BMN sesuai Standar Barang Standar Kebutuhan**

Salah satu bentuk pengelolaan BMN yang baik adalah penggunaan BMN berupa tanah dan/atau bangunan yang efektif dan efisien. Salah satu tools pengukuran tingkat keefektifan dan efisiensi penggunaan BMN adalah menggunakan Standar Barang Standar Kebutuhan (SBSK). Pelaksanaan pengukuran penggunaan BMN sesuai SBSK berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 172/PMK.06/2020 tentang Standar Barang dan Standar Kebutuhan Barang Milik Negara.

— **Sertifikasi BMN berupa Tanah**

Dalam rangka mewujudkan program 3T (Tertib Administrasi, Tertib Fisik, dan Tertib Hukum) BMN berupa tanah, salah satu upaya yang dilakukan adalah sertifikasi terhadap BMN berupa tanah yang belum bersertipikat Hak Pakai (SHP) atas nama Pemerintah RI cq Kementerian/Lembaga. Dalam pelaksanaan program ini KPKNL bekerjasama dengan Kantor Pertanahan di wilayah kerja dengan dukungan Satuan Kerja untuk proses penerbitan sertipikat hak pakai.

— **Utilisasi Aset**

Dalam pengelolaan BMN, hal yang paling utama adalah memastikan bahwa aset yang dikelola telah terutilisasi sesuai peruntukannya. Peran Pengelola sangat vital dalam memberikan penetapan status penggunaan BMN sebagai dasar Kuasa Pengguna Barang menggunakan untuk mendukung tugas pokok dan fungsinya.

— **Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)**

Salah satu perubahan mendasar pada sektor pengelolaan aset Negara adalah pergeseran pola pikir dan sudut pandang. Jika sebelumnya BMN cenderung dipandang dan diperlakukan sebagai suatu beban (*cost center*), kini menjadi suatu investasi yang strategis dalam menunjang terlaksananya fungsi pemerintahan sekaligus sebagai salah satu faktor sumber penerimaan pendapatan (*revenue center*).

Portofolio BMN yang sangat besar tentu harus dikelola dan diukur kinerjanya dengan baik dan optimal. Dengan adanya pengukuran kinerja aset ini diharapkan dapat merubah paradigma Pengelola BMN dari *asset administrator* menjadi *asset manager*. Evaluasi kinerja aset dilakukan secara periodik dengan tujuan untuk mengukur/mengetahui kinerja BMN, untuk selanjutnya dibuat langkah strategis dalam rangka efisiensi, efektivitas, dan optimalisasi pengelolaan BMN.

b. Optimalisasi Penataan Aset menuju *Revenue Center*

Penerimaan negara bukan pajak menjadi alternatif dalam menyokong APBN selain penerimaan dari sektor perpajakan. Melalui pengelolaan BMN, KPKNL sebagai pengelola dapat mengoptimalkan penggunaan/pemanfaatan aset sehingga mengubah paradigma *cost center* menjadi *revenue center*.

c. Memberikan Pelayanan Pengurusan Piutang Negara

Melakukan penyiapan bahan penetapan dan penagihan piutang negara serta pemeriksaan kemampuan penanggung hutang dan/atau penjamin hutang, pemblokiran, pelaksanaan PB/PJPN, pemberian pertimbangan keringanan hutang, pengusulan pencegahan ke luar wilayah RI, pengusulan dan pelaksanaan paksa badan, penyiapan pertimbangan penyelesaian atau penghapusan piutang negara, usul pemblokiran surat berharga milik penanggung/penjamin hutang yang diperdagangkan di bursa efek, usul untuk memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah debitur, pengelolaan dan pemeriksaan barang jaminan milik penanggung hutang.

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 163/KMK.06/2020 tentang Pengelolaan Piutang Negara pada Kementerian Negara/Lembaga, Bendahara Umum Negara dan Pengurusan Sederhana oleh Panitia Urusan Piutang Negara, Piutang Negara dengan nilai sampai dengan Rp8.000.000,00 tidak dapat diserahkan pengurusannya kepada PUPN pada prinsipnya diselesaikan sendiri oleh Menteri/Pimpinan Lembaga sesuai mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 163/KMK.06/2020 dan KPKNL melaksanakan pengurusan piutang negara dengan nilai penyerahan diatas Rp8.000.000,00.

Selanjutnya, KPKNL Malang juga melaksanakan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 30//2024 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus / Dikelola oleh

Panitia Urusan Piutang Negara / Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun Anggaran 2024.

d. Memberikan Pelayanan Lelang

Pelayanan lelang bertujuan untuk menyediakan sarana transaksi penjualan aset secara umum. Dalam memberikan pelayanan lelang, KPKNL Malang secara terus-menerus mengupayakan penggalan potensi lelang baik lelang eksekusi maupun non eksekusi, sehingga lelang dapat dijadikan sebagai salah satu sarana jual beli yang diminati oleh masyarakat (*sales mean auction*).

Selain itu, lelang merupakan pelaksanaan suatu putusan/penetapan pengadilan maupun PUPN. Dalam pelaksanaan lelang terdapat beberapa keuntungan dibandingkan dengan transaksi jual beli biasa, yaitu lebih transparan, akuntabel, kompetitif, efisien, dan lebih menjamin kepastian hukum dengan adanya risalah lelang yang merupakan akta otentik/dokumen negara.

Risalah Lelang berfungsi sebagai Akta Jual Beli (*acte van transport*) untuk kepentingan peralihan hak. KPKNL Malang diharapkan menjadi akselerator agar lelang lebih diminati masyarakat seperti pelaksanaan jual beli biasa dan dapat berperan dalam menggerakkan perekonomian masyarakat khususnya di wilayah kerjanya.

Selanjutnya, pada tahun 2024, KPKNL Malang juga melaksanakan kegiatan Sukarela Lelang Produk UMKM, yang diselenggarakan dengan tujuan:

1. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.
2. Mendorong ide-ide kreatif, inovatif serta solutif yang dapat langsung diimplementasikan guna mewujudkan lelang sebagai instrumen jual beli bagi masyarakat.
3. Memasyarakatkan lelang sukarela dengan mengenalkan lebih baik lagi kepada masyarakat penyelenggara lelang, baik KPKNL maupun Balai Lelang/Pejabat Lelang Kelas II.
4. Mengeksplorasi produk UMKM di wilayah kerja kantor penyelenggara lelang dan meningkatkan kerja sama dengan pengusaha UMKM, sebagai upaya mendukung program Pemulihan Ekonomi Nasional.

e. Memberikan Kontribusi Pemasukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Ke Kas Negara

Dalam pelayanan pengurusan piutang negara, KPKNL Malang memperoleh PNBP berupa biaya administrasi (biad) Pengurusan Piutang Negara. Sedangkan dalam pelayanan lelang, KPKNL Malang memperoleh bea lelang (bea permohonan lelang, bea lelang pembeli dan/atau bea lelang penjual, bea lelang batal, serta bea lelang pegadaian) termasuk Uang

Jaminan Lelang dari Pembeli Wanprestasi yang selanjutnya disetorkan ke kas negara sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Selain itu, dalam pengelolaan kekayaan negara, KPKNL Malang juga memberikan kontribusi yang cukup besar dalam Penerimaan Negara yang berasal dari Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui pemberian persetujuan pemanfaatan aset (sewa) atau persetujuan pemindahtanganan/penjualan.

D. SISTEMATIKA LAPORAN

Laporan Kinerja **KPKNL Malang** Tahun 2024 menggunakan Sistematika Laporan sebagai berikut:

1. Ikhtisar Eksekutif

Bagian ini menguraikan secara singkat tentang tujuan dan sasaran yang akan dicapai beserta hasil capaian, kendala-kendala yang dihadapi dalam mencapai tujuan dan sasaran, langkah-langkah antisipatif yang diambil.

2. Bab I Pendahuluan

Bagian ini menguraikan penjelasan umum organisasi yang terdiri dari tugas, fungsi, dan struktur organisasi dan peran strategis instansi KPKNL Malang serta sistematika laporan.

3. Bab II Perencanaan Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang perencanaan strategis, perjanjian kinerja, pengukuran kinerja dan penetapan kinerja.

4. Bab III Akuntabilitas Kinerja

Bagian ini menguraikan tentang sasaran kinerja, capaian kinerja organisasi dan realisasi anggaran KPKNL Malang tahun 2024.

5. Bab IV Penutup

Bagian ini menguraikan tentang simpulan umum atas capaian organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerja.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja KPKNL Malang Tahun 2024 diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan untuk meningkatkan kinerja KPKNL Malang di tahun yang akan datang. Sebagai pedoman dan motivasi bagi pegawai, KPKNL Malang membuat *Motto* yaitu **MBOIS** (**M**aju untuk memberikan layanan terbaik, **B**Onafive dengan layanan yang terpercaya, dan **I**Stimewa bagi seluruh pengguna layanan).

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, Kementerian Keuangan. Penyusunan Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mempertimbangkan berbagai kondisi yang berpengaruh pada perekonomian Indonesia sehingga pilihan kebijakan dan strategi yang dirumuskan dalam Renstra Direktorat Jenderal Kekayaan Negara diharapkan mampu menjawab tantangan di bidang perekonomian khususnya di bidang pengelolaan kekayaan negara.

Sehubungan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor KEP-245/KN/2020 tentang Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Tahun 2020-2024, serta untuk mewujudkan Visi DJKN, Visi Kementerian Keuangan, serta Visi Presiden dan Wakil Presiden, KPKNL Malang berpartisipasi aktif mendukung tercapainya Tujuan, Strategi, dan Sasaran Strategis sebagaimana terdapat pada Rencana Strategis DJKN Tahun 2020-2024, yaitu:

— VISI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA

Dengan mempertimbangkan capaian kinerja, potensi dan permasalahan serta Roadmap DJKN to *distinguished Asset Manager* yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Kekayaan Negara Nomor 239/KN/2019, maka visi Direktorat Jenderal Kekayaan Negara untuk tahun 2020-2024 adalah: Menjadi Pengelola Kekayaan Negara yang Profesional dan Akuntabel dalam rangka mendukung visi Kementerian Keuangan: Menjadi Pengelola Keuangan Negara untuk mewujudkan Perekonomian Indonesia yang Produktif, Kompetitif, Inklusif, dan Berkeadilan, serta untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Pada visi tersebut, terminologi Pengelola Kekayaan Negara merupakan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara sebagai lembaga atau institusi yang mempunyai tugas untuk merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan negara secara profesional dan akuntabel. Profesional adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai prosedur, norma waktu, standar profesi, dan standar keilmuan yang telah diterapkan. Akuntabel adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat adalah pengelolaan kekayaan negara dilaksanakan untuk kepentingan negara dalam mewujudkan kemakmuran rakyat.

— **MISI DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Demi merealisasikan visi yang telah ditetapkan, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara mendukung Misi Kementerian Keuangan melalui Misi sebagai berikut:

1. Mengoptimalkan pengelolaan kekayaan negara;
2. Mengamankan kekayaan negara secara fisik, administrasi, dan hukum;
3. Meningkatkan tata kelola dan nilai tambah pengelolaan kekayaan negara;
4. Menghasilkan nilai kekayaan negara yang wajar dan dapat dijadikan acuan dalam berbagai keperluan;
5. Mewujudkan lelang yang efisien, transparan, akuntabel, adil, dan kompetitif sebagai instrumen jual beli yang mampu mengakomodasi kepentingan masyarakat.

— **TUJUAN DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Tujuan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara pada tahun 2020-2024 adalah:

1. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial;
2. Pelayanan lelang yang modern dan terpercaya;
3. Pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien;
4. Birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien.

— **SASARAN STRATEGIS DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA**

Demi mendukung pencapaian tujuan sebagaimana tersebut di atas, Direktorat Jenderal Kekayaan Negara menetapkan sasaran strategis sebagai berikut:

1. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien dan efektif serta memberi manfaat finansial dan sosial adalah:
 - a. Pengelolaan kekayaan negara yang lebih efisien, efektif, dan optimal;
 - b. Pengelolaan investasi pemerintah yang memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lainnya.
2. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan lelang yang modern dan terpercaya adalah pengelolaan lelang yang optimal;
3. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan pelayanan penilaian yang akuntabel dan efisien adalah penilaian yang berkualitas;
4. Sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tujuan birokrasi dan layanan publik DJKN yang agile, efektif, dan efisien adalah:

- a. Organisasi dan SDM yang optimal;
- b. Pengawasan dan pengendalian yang bernilai tambah;
- c. Sistem informasi yang andal dan terintegrasi;
- d. komunikasi publik yang efektif.

B. PENETAPAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai indikator kinerja.

Penetapan kinerja yang telah ditargetkan merupakan tolok ukur keberhasilan organisasi dan menjadi dasar penilaian dalam evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun. Gambaran penetapan kinerja KPKNL Malang Tahun 2024 dijabarkan dalam melalui 11 Sasaran Strategis dan 20 IKU sebagai berikut :

- 1 **SS : Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan.**
 IKU : Indeks Integritas Organisasi tercapai sebesar 103,67%
 IKU : Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang tercapai sebesar 120,00%
- 2 **SS : Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa**
 IKU : Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tercapai sebesar 120,00%
 IKU : Tingkat EfektifitasTindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara tercapai sebesar 108,62%
- 3 **SS : Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal**
 IKU : Persentase realisasi pokok lelang tercapai sebesar 120,00%
 IKU : Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara tercapai sebesar 120,00%
- 4 **SS : Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien**
 IKU : Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian tercapai sebesar

120,00%

- 5 SS : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif**
IKU : Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan tercapai sebesar 113,11%
IKU : Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) tercapai sebesar 120,00%
IKU : Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN eks BMN Idle tercapai sebesar 120,00%
- 6 SS : Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif**
IKU : Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) tercapai sebesar 120,00%
IKU : Persentase Produktivitas Lelang tercapai sebesar 120,00%
- 7 SS : Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional**
IKU : Deviasi ketergunaan hasil penilaian tercapai sebesar 120,00%
- 8 SS : Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif**
IKU : Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai tercapai sebesar 120,00%
IKU : Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko tercapai sebesar 115,61%
- 9 SS : Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel**
IKU : Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran tercapai sebesar 120,00%
IKU : Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN tercapai sebesar 120,00%
- 10 SS : Komunikasi Publik yang Efektif**
IKU : Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik tercapai sebesar 120,00%
- 11 SS : Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah**
IKU : Indeks Efektifitas UKI tercapai sebesar 119,20%
IKU : Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembagunan ZI-WBK/WBBM tercapai sebesar 105,00%

PENGHITUNGAN NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)

KPKNL MALANG

TAHUN 2024

| Kode | IKU | V/C | Target Q4 | Realisasi Q4 | Bobot Awal | Bobot Akhir IKU | Indeks Tanpa Batas | Indeks Max. 120% | Ket. |
|-------|---|-----|-----------|--------------|------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| | Stakeholder Perspective (30%) | | | | | | | 33,18% | |
| 1 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan | | | | | | | 110,60% | |
| 1a-CP | Indeks Integritas Organisasi | P/L | 89,17 | 92,44 | 19% | 58% | 103,67% | 103,67% | hijau |
| 1b-CP | Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | P/M | 100% | 134% | 14% | 42% | 134,31% | 120,00% | hijau |
| | Customer Perspective (20%) | | | | | | | 23,62% | |
| 2 | Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa | | | | | | | 114,31% | |
| 2a-CP | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK | P/M | 71,50% | 90,45% | 14% | 50% | 126,51% | 120,00% | hijau |
| 2b-CP | Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara | P/M | 86,50% | 93,96% | 14% | 50% | 108,62% | 108,62% | hijau |
| 3 | Pengelolaan Piutang Negara | | | | | | | 120,00% | |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|------|---------|-----|--------|---------|---------|-------|
| | dan Lelang yang optimal | | | | | | | | |
| 3a-CP | Persentase realisasi pokok lelang | P/M | 100% | 150,49% | 14% | 50% | 150,49% | 120,00% | hijau |
| 3b-CP | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | P/M | 100% | 243,20% | 14% | 50% | 243,20% | 120,00% | hijau |
| 4 | Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien | | | | | | | 120,00% | |
| 4a-CP | Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian | P/H | 75 | 111 | 11% | 100% | 148,00% | 120,00% | hijau |
| | Internal Process Perspective (25%) | | | | | | | 29.75% | |
| 5 | Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif | | | | | | | 117.03% | |
| 5a-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan | P/L | 100% | 113,11% | 19% | 43,18% | 113,11% | 113,11% | hijau |
| 5b-CP | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | P/H | 100% | 120,31% | 11% | 25,00% | 120,31% | 120,00% | hijau |
| 5c-CP | Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN eks BMN Idle | P/M | 100 | 100 | 14% | 31,82% | 100,00% | 120,00% | hijau |
| 6 | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif | | | | | | | 120,00% | |
| 6a-CP | Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) | P/M | 92% | 71,74% | 14% | 50,00% | 122,03% | 120,00% | hijau |
| 6b-CP | Persentase Produktivitas Lelang | P/M | 89% | 111,49% | 14% | 50,00% | 125,27% | 120,00% | hijau |
| 7 | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional | | | | | | | 120.00% | |
| 7a-CP | Deviasi ketergunaan hasil penilaian | P/M | 16% | 0% | 14% | 100% | 200% | 120,00% | hijau |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----|------|--------|-----|----------|---------|----------------|--------------|
| | Learning & Growth Perspective (25%) | | | | | | | 29.37% | |
| 8 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | | | | | 117,81% | |
| 8a-N | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | P/M | 90 | 121,27 | 14% | 50,00% | 134,74% | 120,00% | hijau |
| 8b-N | Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko | P/M | 85 | 98,27 | 14% | 50,00% | 115,61% | 115,61% | hijau |
| 9 | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel | | | | | | | 120.00% | |
| 9a-CP | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | P/M | 100% | 120% | 14% | 50,00% | 120,00% | 120,00% | hijau |
| 9b-CP | Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN | P/M | 10% | 0,00% | 14% | 50,00% | 200,00% | 120,00% | hijau |
| 10 | Komunikasi Publik yang Efektif | | | | | | | 120.00% | |
| 10a-N | Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik | P/M | 80 | 100 | 14% | 100,00 % | 125,00% | 120,00% | hijau |
| 11 | Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah | | | | | | | 112,10% | |
| 11a-CP | Indeks Efektifitas UKI | P/M | 82 | 97,74 | 14% | 50,00% | 119,20% | 119,20% | hijau |
| 11b-N | Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembagunan ZI-WBK/WBBM | P/M | 100% | 105% | 14% | 50,00% | 105,00% | 105,00% | hijau |
| Nilai Kinerja Organisasi (NKO) | | | | | | | | 115.92% | hijau |
| | | | | | | | | | |

Dalam kontrak kinerja tersebut di atas berisi Sasaran Strategis (SS), Indikator Kinerja Utama (IKU), target IKU Tahun 2024 dan realisasi capaian IKU Tahun 2024. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah turunan dari SS, yang merupakan indikator tercapai/ tidaknya SS tersebut. Pencapaian realisasi IKU dengan status hijau atau $\geq 100\%$ dari target yang telah ditetapkan dalam Kontrak Kinerja (KK) mengindikasikan keberhasilan pencapaian suatu Sasaran Strategis.

Dalam rangka mengukur capaian indikator kinerja Tahun 2024, KPKNL Malang berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 467/MK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja di Lingkungan Kementerian Keuangan.

Pengukuran capaian kinerja Utama (IKU) ditetapkan berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

1. Angka maksimum indeks capaian setiap IKU ditetapkan sebesar 120%
2. Indeks capaian IKU dikonversikan menjadi maximize semua agar sebanding dengan yang lainnya
3. Status capaian IKU yang ditunjukkan dengan warna merah/kuning/hijau, ditentukan oleh Indeks Capaian IKU
4. IKU yang ditetapkan, diupayakan realisasi pencapaiannya memungkinkan melebihi target
5. Untuk IKU yang capaiannya tidak memungkinkan melebihi target, maka capaiannya ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Apabila realisasi pencapaiannya sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut dikonversi menjadi 120%;
 - b. Apabila realisasi pencapaiannya tidak sama dengan target, maka indeks capaian IKU tersebut tidak dilakukan konversi.

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang adalah perwujudan kewajiban dari seluruh rangkaian kegiatan yang dipertanggungjawabkan, baik keberhasilan maupun kegagalan dalam upaya menjalankan visi dan misi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Pada bab ini dikemukakan rencana dan realisasi dari setiap kegiatan dan sasaran Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang, capaian kinerja, beserta analisisnya.

A. a. Capaian Kinerja Organisasi

Ikhtisar capaian kinerja organisasi terdapat dalam IKU Kemenkeu-*Three* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

PENGHITUNGAN NILAI KINERJA ORGANISASI (NKO)
KPKNL MALANG
TAHUN 2024

| Kode | IKU | V/C | Target Q4 | Realisasi Q4 | Bobot Awal | Bobot Akhir IKU | Indeks Tanpa Batas | Indeks Max. 120% | Ket. |
|-------|---|-----|-----------|--------------|------------|-----------------|--------------------|------------------|-------|
| | Stakeholder Perspective (30%) | | | | | | | 33,18% | |
| 1 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan | | | | | | | 110,60% | |
| 1a-CP | Indeks Integritas Organisasi | P/L | 89,17 | 92,44 | 19% | 58% | 103,67% | 103,67% | hijau |

| | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|-----|--------|---------|-----|--------|---------|---------|-------|
| 1b-CP | Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | P/M | 100% | 134% | 14% | 42% | 134,31% | 120,00% | hijau |
| Customer Perspective (20%) | | | | | | | | 23,62% | |
| 2 | Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa | | | | | | | 114,31% | |
| 2a-CP | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK | P/M | 71,50% | 90,45% | 14% | 50% | 126,51% | 120,00% | hijau |
| 2b-CP | Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara | P/M | 86,50% | 93,96% | 14% | 50% | 108,62% | 108,62% | hijau |
| 3 | Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal | | | | | | | 120,00% | |
| 3a-CP | Persentase realisasi pokok lelang | P/M | 100% | 150,49% | 14% | 50% | 150,49% | 120,00% | hijau |
| 3b-CP | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | P/M | 100% | 243,20% | 14% | 50% | 243,20% | 120,00% | hijau |
| 4 | Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien | | | | | | | 120,00% | |
| 4a-CP | Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian | P/H | 75 | 111 | 11% | 100% | 148,00% | 120,00% | hijau |
| Internal Process Perspective (25%) | | | | | | | | 29,75% | |
| 5 | Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif | | | | | | | 117,03% | |
| 5a-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan | P/L | 100% | 113,11% | 19% | 43,18% | 113,11% | 113,11% | hijau |
| 5b-CP | Persentase Evaluasi Kinerja | P/H | 100% | 120,31% | 11% | 25,00% | 120,31% | 120,00% | hijau |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|------|---------|-----|--------|---------|---------|-------|
| | BMN (Portofolio Aset) | | | | | | | | |
| 5c-CP | Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN eks BMN Idle | P/M | 100 | 100 | 14% | 31,82% | 100,00% | 120,00% | hijau |
| 6 | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif | | | | | | | 120,00% | |
| 6a-CP | Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) | P/M | 92% | 71,74% | 14% | 50,00% | 122,03% | 120,00% | hijau |
| 6b-CP | Persentase Produktivitas Lelang | P/M | 89% | 111,49% | 14% | 50,00% | 125,27% | 120,00% | hijau |
| 7 | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional | | | | | | | 120,00% | |
| 7a-CP | Deviasi ketergunaan hasil penilaian | P/M | 16% | 0% | 14% | 100% | 200% | 120,00% | hijau |
| | Learning & Growth Perspective (25%) | | | | | | | 29,37% | |
| 8 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | | | | | 117,81% | |
| 8a-N | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | P/M | 90 | 121,27 | 14% | 50,00% | 134,74% | 120,00% | hijau |
| 8b-N | Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko | P/M | 85 | 98,27 | 14% | 50,00% | 115,61% | 115,61% | hijau |
| 9 | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel | | | | | | | 120,00% | |
| 9a-CP | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | P/M | 100% | 120% | 14% | 50,00% | 120,00% | 120,00% | hijau |
| 9b-CP | Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN | P/M | 10% | 0,00% | 14% | 50,00% | 200,00% | 120,00% | hijau |
| 10 | Komunikasi Publik yang Efektif | | | | | | | 120,00% | |

| | | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|-----|------|-------|-----|----------|---------|----------------|--------------|
| 10a-N | Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik | P/M | 80 | 100 | 14% | 100,00 % | 125,00% | 120,00% | hijau |
| 11 | Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah | | | | | | | 112,10% | |
| 11a-CP | Indeks Efektifitas UKI | P/M | 82 | 97,74 | 14% | 50,00% | 119,20% | 119,20% | hijau |
| 11b-N | Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembagunan ZI-WBK/WBBM | P/M | 100% | 105% | 14% | 50,00% | 105,00% | 105,00% | hijau |
| Nilai Kinerja Organisasi (NKO) | | | | | | | | 115.92% | hijau |

A. b. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Terdapat 20 (dua puluh) jenis Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Kemenkeu-*Three* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang Tahun 2024 sebagaimana tergambar dalam tabel di atas. Semua Indikator Kinerja Utama Kemenkeu-*Three* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang Tahun 2024 telah memenuhi target dengan status HIJAU atau tingkat pencapaian target $\geq 100\%$.

Berikut ini kami sajikan analisis dan evaluasi atas pencapaian target setiap IKU dalam Kemenkeu-*Three* Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis (SS) 1: Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|---------|--|
| 1 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan | | | | | | | 110,60% | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|---------|--|

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|-------|-------|-----|-----|---------|---------|-------|
| 1a-CP | Indeks Integritas Organisasi | P/L | 89,17 | 92,44 | 19% | 58% | 103,67% | 103,67% | hijau |
| 1b-CP | Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | P/M | 100% | 134% | 14% | 42% | 134,31% | 120.00% | hijau |

Secara keseluruhan, capaian atas (SS) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan pada tahun 2024 telah mencapai hasil yang optimal dengan capaian sebesar 110,60%.

Sasaran Strategis (SS) Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 1 : Indeks Integritas Organisasi**

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|-------|-------|-----|-----|---------|---------|-------|
| 1 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan | | | | | | | 110,60% | |
| 1a-CP | Indeks Integritas Organisasi | P/L | 89,17 | 92,44 | 19% | 58% | 103,67% | 103,67% | hijau |

Nilai Persentase Indeks Integritas Organisasi pada tahun 2024 adalah 92,44 dari target yang ditetapkan sebesar 89,17, sehingga capaiannya sebesar 103,67% dengan status capaian **HIJAU**. Hal-hal yang mendukung pencapaian target antara lain:

- a. Menyampaikan Matriks Action Plan Hasil SPI 2023;
- b. Melaksanakan Kegiatan Pencegahan : Sosialisasi Anti Korupsi;
- c. Menyampaikan Nota Dinas Penyampaian Daftar Responden Internal dan Eksternal ke Inspektorat Jenderal;
- d. Melaksanakan tindak lanjut matriks Action Plan Hasil SPI 2023 (Triwulan III).

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 : Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang**

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|-------|------|-----|-----|---------|---------|--------------|
| 1 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan | | | | | | | 110,60% | |
| 1b-CP | Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | P/M | 100 % | 134% | 14% | 42% | 134,31% | 120.00% | hijau |

Realisasi Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang pada tahun 2024 adalah sebesar 134.00% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya sebesar 120% dengan status capaian **HIJAU**. Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- a. Berkoordinasi dengan pemohon lelang untuk lebih memprioritaskan permohonan yang berpotensi laku;
- b. Berkoordinasi dengan pemohon lelang dan Kantor Pertanahan di wilayah kerja KPKNL Malang untuk menyelesaikan permasalahan terkait penggunaan SKPT online;
- c. Meningkatkan frekuensi pelaksanaan lelang;
- d. Melaksanakan sosialisasi terkait permohonan lelang sukarela dan lelang rampasan Kejaksaan;
- e. Melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja terkait PNPB.

2. Sasaran Strategis (SS) 2: Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|--------|--------|-----|-----|---------|---------|-------|
| 2 | Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa | | | | | | | 114,31% | |
| 2a-CP | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK | P/M | 71,50% | 90,45% | 14% | 50% | 126,51% | 120,00% | hijau |
| 2b-CP | Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara | P/M | 86,50% | 93,96% | 14% | 50% | 108,62% | 108,62% | hijau |

Secara keseluruhan, capaian atas (SS) Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa pada tahun 2024 telah mencapai hasil yang optimal dengan capaian sebesar 114,31%.

Sasaran Strategis (SS) Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 3 : Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|---------|--------|-----|-----|---------|---------|-------|
| 2 | Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa | | | | | | | 114,31% | |
| 2a-CP | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK | P/M | 71,50 % | 90,45% | 14% | 50% | 126,51% | 120,00% | hijau |

Persentase Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK tercapai sebesar 126.51% dari target yang ditetapkan 71,50% sehingga capaiannya sebesar 120% dengan status capaian **HIJAU**.

Hal-hal yang mendukung capaian ini tentunya tidak lepas dari penerapan strategi, yaitu dengan melakukan koordinasi dengan Kantor Pusat dan Kanwil DJKN terkait upload data target pengganti.

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 4 : Tingkat EfektifitasTindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara**

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|--------|--------|-----|-----|---------|---------|--------------|
| 2 | Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa | | | | | | | 114,31% | |
| 2b-CP | Tingkat EfektifitasTindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara | P/M | 86,50% | 93,96% | 14% | 50% | 108,62% | 108,62% | hijau |

Realisasi Persentase Tingkat EfektifitasTindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara pada tahun 2024 yakni sebesar 108,62% dari target yang ditetapkan sebesar 86,50%, sehingga capaiannya adalah sebesar 108,62% dengan status capaian **HIJAU**. Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- a. Melaksanakan proses Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) Persetujuan Pengelolaan BMN yang tidak ditindaklanjuti;
- b. Bersurat kepada Satker untuk minta konfirmasi tindaklanjut atas persetujuan yang telah diterbitkan;
- c. Berkoordinasi dengan Jafung Pelelang untuk rencana usulan Lelang Serentak.

3. Sasaran Strategis (SS) 3: Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|------|---------|-----|-----|---------|---------|--------------|
| 3 | Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal | | | | | | | 120.00% | |
| 3a-CP | Persentase realisasi pokok lelang | P/M | 100% | 150,49% | 14% | 50% | 150,49% | 120,00% | hijau |
| 3b-CP | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | P/M | 100% | 243,20% | 14% | 50% | 243,20% | 120,00% | hijau |

Secara keseluruhan, capaian atas (SS) Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal pada tahun 2024 telah mencapai hasil yang optimal dengan capaian sebesar 120,00%. Sasaran Strategis (SS) Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 5 : Persentase realisasi pokok lelang

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|------|---------|-----|-----|---------|---------|-------|
| 3 | Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal | | | | | | | 120.00% | |
| 3a-CP | Persentase realisasi pokok lelang | P/M | 100% | 150,49% | 14% | 50% | 150,49% | 120,00% | hijau |

Realisasi Persentase realisasi pokok lelang pada tahun 2024 yakni sebesar 150,49% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**. Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- a. Berkoordinasi untuk penggalan potensi lelang dengan pemohon lelang untuk lebih memprioritaskan permohonan yang berpotensi laku;
- b. Berkoordinasi dengan pemohon lelang dan Kantor Pertanahan di wilayah kerja KPKNL Malang untuk menyelesaikan permasalahan terkait penggunaan SKPT online;
- c. Melaksanakan koordinasi terkait lelang sukarela dan lelang barang rampasan.

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 6 : Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|------|---------|-----|-----|---------|---------|-------|
| 3 | Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal | | | | | | | 120.00% | |
| 3b-CP | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | P/M | 100% | 243,20% | 14% | 50% | 243,20% | 120,00% | hijau |

Realisasi Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara pada tahun 2024 yakni sebesar 243,20% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**.

4. Sasaran Strategis (SS) 4 : Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|----|-----|-----|------|---------|---------|-------|
| 4 | Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien | | | | | | | 120,00% | |
| 4a-CP | Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian | P/H | 75 | 111 | 11% | 100% | 148,00% | 120,00% | hijau |

Secara keseluruhan, capaian atas (SS) Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien pada tahun 2024 telah mencapai hasil yang optimal dengan capaian sebesar 120,00%. Sasaran Strategis (SS) Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 7 : Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|----|-----|-----|------|---------|---------|-------|
| 4 | Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien | | | | | | | 120,00% | |
| 4a-CP | Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian | P/H | 75 | 111 | 11% | 100% | 148,00% | 120,00% | hijau |

Realisasi Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian pada tahun 2024 yakni sebesar 148,00% dari target yang ditetapkan sebesar 75, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**.

5. Sasaran Strategis (SS) 5 : Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|------|---------|-----|--------|---------|---------|-------|
| 5 | Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif | | | | | | | 117.03% | |
| 5a-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan | P/L | 100% | 113,11% | 19% | 43,18% | 113,11% | 113,11% | hijau |
| 5b-CP | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | P/H | 100% | 120,31% | 11% | 25,00% | 120,31% | 120,00% | hijau |

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|-----|-----|-----|--------|---------|---------|-------|
| 5c-CP | Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN eks BMN Idle | P/M | 100 | 100 | 14% | 31,82% | 100,00% | 120,00% | hijau |
|-------|---|-----|-----|-----|-----|--------|---------|---------|-------|

Secara keseluruhan, capaian atas (SS) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif pada tahun 2024 telah mencapai hasil yang optimal dengan capaian sebesar 117,03%. Sasaran Strategis (SS) Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 8 : Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan**

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|------|---------|-----|--------|---------|---------|-------|
| 5 | Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif | | | | | | | 117.03% | |
| 5a-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan | P/L | 100% | 113,11% | 19% | 43,18% | 113,11% | 113,11% | hijau |

Realisasi Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan pada tahun 2024 yakni sebesar 113,11% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya adalah sebesar 113,11% dengan status capaian **HIJAU**. Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- a. Melakukan rapat Monev Program Percepatan Sertifikasi BMN Berupa Tanah baik secara daring maupun luring;
- b. Melakukan penyampaian surat kepada satker pemilik objek target agar segera melakukan tindaklanjut;
- c. Untuk target K1 dan K3, melaksanakan koordinasi dengan Bidang PHP Kanwil BPN;
- d. Untuk target K3, menyampaikan surat kepada satker untuk segera menyampaikan permohonan akun mitra Sentuh Tanahku. Satker sudah menindaklanjuti dan memiliki akun mitra;
- e. Melakukan eskalasi permasalahan sertifikasi kepada Kanwil DJKN dan Dit. PKKN;
- f. Data SHP yang sudah terbit atas nama PJKA/Perumka/PT KAI tetap diinput dan menunggu arahan dari Kantor Pusat DJKN untuk mekanisme BBSK;
- g. Melaksanakan sosialisasi dan bimbingan teknis akun mitra aplikasi Sentuh Tanahku bersama dengan Kanwil BPN Jawa Timur dan Kanwil DJKN Jawa Timur;

- h. Melaksanakan koordinasi dengan Kantor Pertanahan bersama dengan satker-satker dan/atau bersama Kanwil DJKN Jawa Timur;
- i. Melaksanakan koordinasi dengan Kemenhan/Zidam V Brawijaya mengenai program pensertipikatan tanah dengan hasil antara lain satker akan mendampingi/melakukan pengamanan saat kegiatan pengukuran oleh BPN, bidang tanah disertipikatkan sebagian yang clean and clear;
- j. Mengajukan permohonan revisi SK Penetapan Lokasi kepada Kantor Pertanahan;
- k. Melakukan penugasan secara langsung kepada Denzibang 3/Madiun untuk menyelesaikan target K3;
- l. Melakukan koordinasi dengan satker DJKA untuk membantu penyelesaian target K3.
- m. Berkoordinasi untuk penggalan potensi lelang dengan pemohon lelang untuk lebih memprioritaskan permohonan yang berpotensi laku;
- n. Berkoordinasi dengan pemohon lelang dan Kantor Pertanahan di wilayah kerja KPKNL Malang untuk menyelesaikan permasalahan terkait penggunaan SKPT online;
- o. Melaksanakan koordinasi terkait lelang sukarela dan lelang barang rampasan.

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 9 : Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset)

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|------|---------|-----|--------|---------|---------|-------|
| 5 | Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif | | | | | | | 117,03% | |
| 5b-CP | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | P/H | 100% | 120,31% | 11% | 25,00% | 120,31% | 120,00% | hijau |

Realisasi Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) pada tahun 2024 yakni sebesar 120,31% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah dengan Melakukan koordinasi pendahuluan dengan satker sebelum melaksanakan evaluasi kinerja sehingga didapatkan data-data yang akurat. Caranya dengan meminta satker untuk menghubungi anggota/staff PNS yang melaksanakan dinas di BMN yang menjadi target, sehingga dapat diketahui gambaran aktual kondisi BMN dan lingkungan di sekitarnya.

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 10 : Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN eks BMN Idle**

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|-----|-----|-----|--------|---------|---------|--------------|
| 5 | Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif | | | | | | | 117.03% | |
| 5c-CP | Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN eks BMN Idle | P/M | 100 | 100 | 14% | 31,82% | 100,00% | 120,00% | hijau |

Realisasi Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN eks BMN Idle pada tahun 2024 yakni sebesar 100,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- a. Berkoordinasi dengan satker yang menyatakan minat untuk menggunakan BMN eks BMN idle;
- b. Melakukan pendampingan kepada satker dalam rangka monitoring permohonan alih status BMN eks BMN idle di tingkat pusat.

6. Sasaran Strategis (SS) 6: Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|-----|---------|-----|--------|---------|---------|--------------|
| 6 | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif | | | | | | | 120,00% | |
| 6a-CP | Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) | P/M | 92% | 71,74% | 14% | 50,00% | 122,03% | 120,00% | hijau |
| 6b-CP | Persentase Produktivitas Lelang | P/M | 89% | 111,49% | 14% | 50,00% | 125,27% | 120,00% | hijau |

Secara keseluruhan, capaian atas (SS) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif pada tahun 2024 telah mencapai hasil yang optimal dengan capaian sebesar 120,00%. Sasaran Strategis (SS) Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 11 : Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN)**

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|-----|--------|-----|--------|---------|---------|-------|
| 6 | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif | | | | | | | 120,00% | |
| 6a-CP | Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) | P/M | 92% | 71,74% | 14% | 50,00% | 122,03% | 120,00% | hijau |

Realisasi Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) pada tahun 2024 yakni sebesar 122,03% dari target yang ditetapkan sebesar 92%, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**.

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 12 : Persentase Produktivitas Lelang**

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|-----|---------|-----|--------|---------|---------|-------|
| 6 | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif | | | | | | | 120,00% | |
| 6b-CP | Persentase Produktivitas Lelang | P/M | 89% | 111,49% | 14% | 50,00% | 125,27% | 120,00% | hijau |

Realisasi Persentase Produktivitas Lelang pada tahun 2024 yakni sebesar 125,27% dari target yang ditetapkan sebesar 89%, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- Melakukan penggalan potensi lelang kepada stakeholders agar lebih mendahulukan permohonan lelang yang berpotensi laku;
- Koordinasi secara aktif dengan pemohon lelang terkait kelengkapan dokumen lelang;
- Membantu mempromosikan produk lelang melalui media sosial.

7. Sasaran Strategis (SS) 7: Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|-----|----|-----|------|------|---------|-------|
| 7 | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional | | | | | | | 120,00% | |
| 7a-CP | Deviasi ketergunaan hasil penilaian | P/M | 16% | 0% | 14% | 100% | 200% | 120,00% | hijau |

Secara keseluruhan, capaian atas (SS) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional pada tahun 2024 telah mencapai hasil yang optimal dengan capaian sebesar 120,00%. Sasaran Strategis (SS) Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 13 : Deviasi ketergunaan hasil penilaian

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|-----|----|-----|------|------|---------|-------|
| 7 | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional | | | | | | | 120.00% | |
| 7a-CP | Deviasi ketergunaan hasil penilaian | P/M | 16% | 0% | 14% | 100% | 200% | 120,00% | hijau |

Realisasi Deviasi ketergunaan hasil penilaian pada tahun 2024 yakni sebesar 200% dari target yang ditetapkan sebesar 16%, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**.

8. Sasaran Strategis (SS) 8: Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif

| | | | | | | | | | |
|------|--|-----|----|--------|-----|--------|---------|---------|-------|
| 8 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | | | | | 117,81% | |
| 8a-N | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | P/M | 90 | 121,27 | 14% | 50,00% | 134,74% | 120,00% | hijau |
| 8b-N | Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko | P/M | 85 | 98,27 | 14% | 50,00% | 115,61% | 115,61% | hijau |

Secara keseluruhan, capaian atas (SS) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif pada tahun 2024 telah mencapai hasil yang optimal dengan capaian sebesar 117,81%. Sasaran Strategis (SS) Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 14 : Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai

| | | | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|---------|--|
| 8 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | | | | | 117,81% | |
|---|---|--|--|--|--|--|--|---------|--|

| | | | | | | | | | |
|------|--|-----|----|--------|-----|--------|---------|---------|-------|
| 8a-N | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | P/M | 90 | 121,27 | 14% | 50,00% | 134,74% | 120,00% | hijau |
|------|--|-----|----|--------|-----|--------|---------|---------|-------|

Realisasi Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai pada tahun 2024 yakni sebesar 134,74% dari target yang ditetapkan sebesar 90, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**. Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- Mengingatkan pegawai secara berkala melalui WAG Kantor dan menyediakan tautan pengisian diklat secara mandiri sebagai alat monitoring Diklat Pegawai KPKNL Malang;
- Menyediakan sarana pelaporan jam diklat yang dapat diakses dengan mudah oleh pegawai (link.tree/umum.kpknmalang);
- Melaksanakan Kegiatan Pembinaan Mental setiap Triwulan sebanyak 4 kali.

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 15 : Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko**

| | | | | | | | | | |
|------|--|-----|----|-------|-----|--------|---------|---------|-------|
| 8 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | | | | | 117,81% | |
| 8b-N | Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko | P/M | 85 | 98,27 | 14% | 50,00% | 115,61% | 115,61% | hijau |

Realisasi Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko pada tahun 2024 yakni sebesar 115,61% dari target yang ditetapkan sebesar 85, sehingga capaiannya adalah sebesar 115,61% dengan status capaian **HIJAU**. Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- Melakukan pemantauan kinerja dan risiko sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Melakukan penandatanganan kontrak kinerja tahun 2024 (*Kemenkeu Three, Four, Five*);
- Menyusun dan melaporkan dokumentasi pelaksanaan kinerja di KPKNL Malang (Rapat Monev Capkin, Rapat DKRO);
- Menyampaikan Dokumen Monev I dan Monev II serta Edukasi ke Kanwil DJKN Jawa Timur.

9. Sasaran Strategis (SS) 9: Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|------|------|-----|--------|---------|---------|-------|
| 9 | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel | | | | | | | 120.00% | |
| 9a-CP | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | P/M | 100% | 120% | 14% | 50,00% | 120,00% | 120,00% | hijau |

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|-----|-------|-----|--------|---------|---------|-------|
| 9b-CP | Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN | P/M | 10% | 0,00% | 14% | 50,00% | 200,00% | 120,00% | hijau |
|-------|--|-----|-----|-------|-----|--------|---------|---------|-------|

Secara keseluruhan, capaian atas (SS) Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel pada tahun 2024 telah mencapai hasil yang optimal dengan capaian sebesar 120,00%. Sasaran Strategis (SS) Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel mendapat status capaian **HIJAU**. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 16 : Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran**

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|------|------|-----|--------|---------|---------|-------|
| 9 | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel | | | | | | | 120.00% | |
| 9a-CP | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | P/M | 100% | 120% | 14% | 50,00% | 120,00% | 120,00% | hijau |

Realisasi Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran pada tahun 2024 yakni sebesar 120,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**. Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- a. Rutin meminta data capaian output dan rencana penarikan dana pada masing-masing seksi setiap bulannya untuk diinput di Aplikasi Sakti Modul Capaian Output;
- b. Mengoptimalkan pencapaian 8 Indikator Reformulasi IKPA sesuai dengan target yang ditetapkan;
- c. Sinergi dari Pimpinan dan seluruh pihak di KPKNL Malang untuk optimalisasi nilai kinerja anggaran pada IKPA.

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 17 : Indeks Pengelolaan Kinerja dan Kualitas Manajemen Risiko**

| | | | | | | | | | |
|-------|--|-----|-----|-------|-----|--------|---------|---------|-------|
| 9 | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel | | | | | | | 120.00% | |
| 9b-CP | Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN | P/M | 10% | 0,00% | 14% | 50,00% | 200,00% | 120,00% | hijau |

Realisasi Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN pada tahun 2024 yakni sebesar 120,00% dari target yang ditetapkan sebesar 10%, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**. Strategi yang telah dilaksanakan adalah dengan secara rutin melakukan rekonsiliasi data Aplikasi Simponi dan Focus PN setiap bulan.

10. Sasaran Strategis (SS) 10: Komunikasi Publik yang Efektif

Secara keseluruhan, capaian atas (SS) Komunikasi Publik yang Efektif pada tahun 2024 telah mencapai hasil yang optimal dengan capaian sebesar 120,00%. Sasaran Strategis (SS) Komunikasi Publik yang Efektif mendapat status capaian HIJAU. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

Ø Indikator Kinerja Utama (IKU) 18 : Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|----|-----|-----|---------|---------|---------|-------|
| 10 | Komunikasi Publik yang Efektif | | | | | | | 120,00% | |
| 10a-N | Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik | P/M | 80 | 100 | 14% | 100,00% | 125,00% | 120,00% | hijau |

Realisasi Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik pada tahun 2024 yakni sebesar 125% dari target yang ditetapkan sebesar 80, sehingga capaiannya adalah sebesar 120,00% dengan status capaian **HIJAU**.

11. Sasaran Strategis (SS) 11: Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah

Secara keseluruhan, capaian atas (SS) Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah pada tahun 2024 telah mencapai hasil yang optimal dengan capaian sebesar 112,10%. Sasaran Strategis (SS) Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah mendapat status capaian HIJAU. Kontribusi pencapaian target di lingkungan KPKNL Malang dapat diuraikan sebagai berikut ini:

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|------|-------|-----|--------|---------|---------|-------|
| 11 | Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah | | | | | | | 112,10% | |
| 11a-CP | Indeks Efektifitas UKI | P/M | 82 | 97,74 | 14% | 50,00% | 119,20% | 119,20% | hijau |
| 11b-N | Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembagunan ZI-WBK/WBBM | P/M | 100% | 105% | 14% | 50,00% | 105,00% | 105,00% | hijau |

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 19 : Indeks Efektifitas UKI**

| | | | | | | | | | |
|--------|---|-----|----|-------|-----|--------|---------|---------|-------|
| 11 | Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah | | | | | | | 112,10% | |
| 11a-CP | Indeks Efektifitas UKI | P/M | 82 | 97,74 | 14% | 50,00% | 119,20% | 119,20% | hijau |

Realisasi Indeks Efektifitas UKI pada tahun 2024 yakni sebesar 119,20% dari target yang ditetapkan sebesar 82, sehingga capaiannya adalah sebesar 119,20% dengan status capaian **HIJAU**. Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- a. Menyusun dan menyampaikan Laporan Efektivitas Pengendalian Intern/LEPI;
- b. Menyusun dan menyampaikan Laporan PMEPI;
- c. Menyusun dan menyampaikan laporan FRS.

Ø **Indikator Kinerja Utama (IKU) 20 : Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembagunan ZI-WBK/WBBM**

| | | | | | | | | | |
|-------|---|-----|------|------|-----|--------|---------|---------|-------|
| 11 | Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah | | | | | | | 112,10% | |
| 11b-N | Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembagunan ZI-WBK/WBBM | P/M | 100% | 105% | 14% | 50,00% | 105,00% | 105,00% | hijau |

Realisasi Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembagunan ZI-WBK/WBBM pada tahun 2024 yakni sebesar 105,00% dari target yang ditetapkan sebesar 100%, sehingga capaiannya adalah sebesar 105,00% dengan status capaian **HIJAU**.

Strategi yang telah dilaksanakan adalah:

- a. Menyampaikan dokumen pendukung keberlanjutan pembangunan WBK di KPKNL Malang berupa SK Tim, Undangan Rapat, Notul serta daftar hadir;
- b. Melakukan upload dokumen pada aplikasi DIA tepat waktu;
- c. Menyampaikan bahan paparan untuk FE tepat waktu.

B. KINERJA LAINNYA

Pada bidang Pelaksanaan Anggaran, KPKNL Malang mendapatkan apresiasi sebagai:

1. TRIWULAN 1 (24 Januari 2024)

KPKNL Malang meraih penghargaan Sebagai Satker Terbaik atas Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kategori Satuan Kerja dengan Pagu s.d. 5 Milyar Periode Triwulan IV TA 2023.



2. TW 1 (22 Februari 2024)

KPKNL Malang meraih penghargaan sebagai Instansi Pendukung Kinerja BC Malang untuk pelaksanaan lelang sarana angkut.



3. TW 2 (27 Juni 2024)

KPKNL Malang menerima penghargaan dalam program percepatan penyelesaian berkas piutang BPD LH oleh Panitia Urusan Piutang Negara. KPKNL Malang termasuk dalam tiga terbanyak dalam hal penyelesaian BKPN BPD LH.





#JAGAASETNEGARA

150 991

4. TW 2 (22 Mei 2024)

Penyerahan Piagam Penghargaan Satuan Kerja Terbaik atas Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode Triwulan II Tahun 2024 dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Malang



#JAGAASETNEGARA

150 991

C. REALISASI ANGGARAN

Pada Tahun 2024 alokasi pagu anggaran KPKNL Malang yang teruang dalam DIPA TA 2024 sejumlah Rp4.236.104.000,-

Adapun realisasi atas pagu anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja digunakan sejumlah Rp4.122.220.263,- dengan kata lain kinerja penyerapan realisasi anggaran KPKNL Malang pada Tahun 2024 mencapai 97,32%.

BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja KPKNL Malang Tahun 2024 ini merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan visi dan misi DJKN c.q. KPKNL Malang serta upaya peningkatan *good governance* yang mengacu pada rencana strategis DJKN tahun 2020-2024. Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, PeLaporan Kinerja, dan tata cara reuiu atas Laporan Kinerja instansi pemerintah.

Keberhasilan KPKNL Malang tergambar dalam pencapaian target IKU dengan status capaian **HIJAU** yang terdiri dari 20 IKU sebagai berikut:

| No. | Kode | IKU | Capaian | Status |
|-----|-------|--|---------|--------|
| 1 | 1a-CP | Indeks Integritas Organisasi | 103,67% | hijau |
| 2 | 1b-CP | Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 120.00% | hijau |
| 3 | 2a-CP | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK | 120.00% | hijau |
| 4 | 2b-CP | Tingkat EfektifitasTindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara | 108,62% | hijau |
| 5 | 3a-CP | Persentase realisasi pokok lelang | 120,00% | hijau |
| 6 | 3b-CP | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | 120,00% | hijau |
| 7 | 4a-CP | Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian | 120,00% | hijau |
| 8 | 5a-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan | 113,11% | hijau |
| 9 | 5b-CP | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | 120,00% | hijau |
| 10 | 5c-CP | Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN eks BMN Idle | 120,00% | hijau |
| 11 | 6a-CP | Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) | 120,00% | hijau |
| 12 | 6b-CP | Persentase Produktivitas Lelang | 120,00% | hijau |
| 13 | 7a-CP | Deviasi ketergunaan hasil penilaian | 120,00% | hijau |

| | | | | |
|----|--------|---|---------|-------|
| 14 | 8a-N | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | 120,00% | hijau |
| 15 | 8b-N | Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko | 115,61% | hijau |
| 16 | 9a-CP | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 120,00% | hijau |
| 17 | 9b-CP | Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN | 120,00% | hijau |
| 18 | 10a-N | Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik | 120,00% | hijau |
| 19 | 11a-CP | Indeks Efektifitas UKI | 119,20% | hijau |
| 20 | 11b-N | Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM | 105,00% | hijau |

A. Permasalahan dan Kendala

Secara umum pencapaian tahun 2024 sudah di atas target yang ditetapkan. Pencapaian IKU KPKNL Malang, dengan nilai kinerja organisasi sebesar 115,92% dengan capaian HIJAU terdiri dari 11 Sasaran Strategis dan 20 IKU. Meskipun keseluruhan IKU yang berjumlah 20 sudah memperoleh capaian hijau masih terdapat beberapa permasalahan yang mungkin mempengaruhi capaian IKU tahun berikutnya, antara lain permasalahan terkait IKU Indeks Integritas Organisasi dan IKU Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM.

B. Strategi Pemecahan Untuk Tahun 2025

Sehubungan dengan permasalahan dan kendala yang terjadi di tahun 2024 tersebut, maka di tahun 2025 diperlukan strategi yang tepat untuk mengatasi masalah tersebut. Dari permasalahan dan kendala pada KPKNL Malang tersebut, rencananya akan dilakukan upaya yaitu dengan cara :

- a. Menciptakan lingkungan kerja yang berintegritas di lingkup KPKNL Malang;
- b. Menambahkan sarana prasarana untuk meningkatkan pelayanan kepada *stake holders*;
- c. Menyusun dan mempersiapkan dokumen keberlanjutan WBK dengan lebih baik;
- d. Melanjutkan kegiatan pembangunan ZI WBK/WBBM.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2024 Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang dimaksudkan sebagai arahan untuk mengembangkan pengukuran terhadap keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja KPKNL Malang tahun 2024 diharapkan KPKNL Malang semakin termotivasi untuk meningkatkan kinerjanya. Dengan demikian, sasaran dan tujuan sebagaimana digariskan dengan visi dan misi dapat dicapai. Selain itu juga diharapkan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan dapat dievaluasi sehingga untuk pelaksanaan kegiatan selanjutnya dapat berjalan dengan lebih baik.

LAMPIRAN I
PERJANJIAN KINERJA

ADENDUM PERJANJIAN KINERJA
NOMOR: PK-3A/WKN.10/2024

Pada hari ini, telah disepakati adendum atas Perjanjian Kinerja Nomor: PK-3/KN/2024 tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Indikator Kinerja Utama

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Semula | | | Menjadi | | |
|-----|--|--------|--|--------|---------|---|-------------------|
| | | | Indikator Kinerja | Target | | Indikator Kinerja | Target |
| 5 | Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif | - | - | - | 5c-CP | Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN eks BMN Idle | 100 |
| 6 | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Produktif | 6a-CP | Persentase Saldo Berkas Piutang Negara | 100 | 6a-CP | Persentase Saldo Berkas Piutang Negara | 92% (601 BKPN) |
| 9 | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel | 9a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 | 9a-CP | Indeks kinerja anggaran | 100 |

B. Perubahan Rincian Target Kinerja

| | | Sebelum | | | | | | | Menjadi | | | | | | | | |
|----------|---|---------|----|---------|----|---------|-------|-------|----------|---|--------|----|---------|----|---------|-------|-------|
| Kode IKU | Indikator Kinerja Individu | Target | | | | | | | Kode IKU | Indikator Kinerja Individu | Target | | | | | | |
| | | Q1 | Q2 | S.d. Q2 | Q3 | S.d. Q3 | Q4 | Y | | | Q1 | Q2 | s.d. Q2 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
| 1a-CP | Indeks integritas | - | - | - | - | - | 89,17 | 89,17 | 1a-CP | Indeks integritas | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 89,17 | 89,17 |
| 2a-CP | Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan | - | 50 | 50 | 60 | 60 | 71,5 | 71,5 | 2a-CP | Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 71,5 | 71,5 |
| 2b-CP | Tingkat Efektivitas dan Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN | - | 45 | 45 | - | - | 86,5 | 86,5 | 2b-CP | Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN | 10 | 45 | 45 | 60 | 60 | 86,5 | 86,5 |
| 5a-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | - | 40 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 5a-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5c-CP | Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN eks BMN Idle | 25 | 55 | 55 | 82 | 82 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----------------|
| 6a-CP | Persentase Saldo Berkas Piutang Negara | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6a-CP | Persentase Saldo Berkas Piutang Negara | 99 | 95 | 95 | 95 | 95 | 92 | 92 (601 BKN) |
| 8a-N | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | 15 | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 | 8a-N | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| 9a-CP | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 9a-CP | Indeks Kinerja Anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11a-CP | Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) | - | - | - | - | - | 82 | 82 | 11a-CP | Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 82 | 82 |
| 11b-N | Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 11b-N | Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Menyetujui,
Kepala Kantor Wilayah DJKN Jawa Timur,



Ditandatangani secara elektronik
Dudung Rudi Hendratna

Surabaya, 31 Mei 2024
Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Malang



Ditandatangani secara elektronik
Ridho Wahyono



ADENDUM SASARAN KINERJA PEGAWAI

Pada hari ini, telah disepakati adanya adendum atas Sasaran Kinerja Pegawai Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang tanggal 30 Januari 2024, dengan rincian sebagai berikut:

A. Perubahan Sasaran Kinerja Pegawai

| Semula | | | | |
|---------|---|---|--------|-------------------------------------|
| No. | Rencana Hasil Kerja | Indikator Kinerja Individu | Target | Perspektif |
| 5 | Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara) | - | - | - |
| 6 | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Produktif | Persentase Saldo Berkas Piutang Negara | 92 | <i>Proses Bisnis</i> |
| 9 | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel | Indeks kinerja kualitas pelaksanaan anggaran | 100 | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel |
| Menjadi | | | | |
| No. | Rencana Hasil Kerja | Indikator Kinerja Individu | Target | Perspektif |
| 5 | Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif (Penugasan dari Direktur Jenderal Kekayaan Negara) | Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN eks BMN Idle | 100 | <i>Proses Bisnis</i> |
| 6 | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang Yang Produktif | Persentase Saldo Berkas Piutang Negara | 92 | <i>Proses Bisnis</i> |

| | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------------------------|
| 9 | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel | Indeks kinerja anggaran | 100 | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel |
|---|-------------------------------------|-------------------------|-----|-------------------------------------|

B. Perubahan Lampiran Sasaran Kinerja Pegawai

| Sebelum | | | | | | | | | Menjadi | | | | | | | | |
|---------|--|--------|-----|--------|-----|---------|-------|-------|---------|--|--------|-----|--------|-----|---------|-------|-------|
| No. | Indikator Kinerja Individu | Target | | | | | | | No. | Indikator Kinerja Individu | Target | | | | | | |
| | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y | | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d. Q3 | Q4 | Y |
| 1 | Indeks integritas | - | - | - | - | - | 89,17 | 89,17 | 1 | Indeks integritas | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 89,17 | 89,17 |
| 2 | Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2 | Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan | - | 50 | 50 | 60 | 60 | 71,5 | 71,5 | 3 | Tingkat kesesuaian penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan | 30 | 50 | 50 | 60 | 60 | 71,5 | 71,5 |
| 4 | Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN | - | 45 | 45 | - | - | 86,5 | 86,5 | 4 | Tingkat Efektivitas Tindak lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN | 10 | 45 | 45 | 60 | 60 | 86,5 | 86,5 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---------------|
| 5 | Persentase Realisasi Pokok Lelang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 5 | Persentase Realisasi Pokok Lelang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 6 | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 7 | Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 8 | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | - | 40 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 | 8 | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 20 | 40 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 |
| 9 | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | 10 | 32 | 32 | 80 | 80 | 100 | 100 | 9 | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | 10 | 32 | 32 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| = | Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN eks BMN Idle | - | - | - | - | - | - | - | 10 | Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN eks BMN Idle | 25 | 55 | 55 | 82 | 82 | 100 | 100 |
| 10 | Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 11 | Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara | 99 | 95 | 95 | 95 | 95 | 92 | 92 (601 BKPN) |
| 11 | Persentase Produktifitas Lelang | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 89 | 89 | 12 | Persentase Produktifitas Lelang | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 89 | 89 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 12 | Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 13 | Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 13 | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | 15 | 40 | 40 | 75 | 75 | 100 | 100 | 14 | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | 45 | 60 | 60 | 80 | 80 | 90 | 90 |
| 14 | Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 15 | Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 15 | Indeks kinerja kualitasp engelolaan keuangan BA 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 16 | Indeks Kinerja Anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Deviasi Data PNBPFungsional DJKN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 17 | Deviasi Data PNBPFungsional DJKN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 17 | Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 18 | Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 18 | Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) | - | - | - | - | - | 82 | 82 | 19 | Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) | 5 | 15 | 15 | 20 | 20 | 82 | 82 |
| 19 | Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM | - | - | - | - | - | 100 | 100 | 20 | Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

Pejabat yang dinilai,



Ditandatangani secara elektronik
Ridho Wahyono

Surabaya, 31 Mei 2024
Pejabat penilai kinerja,



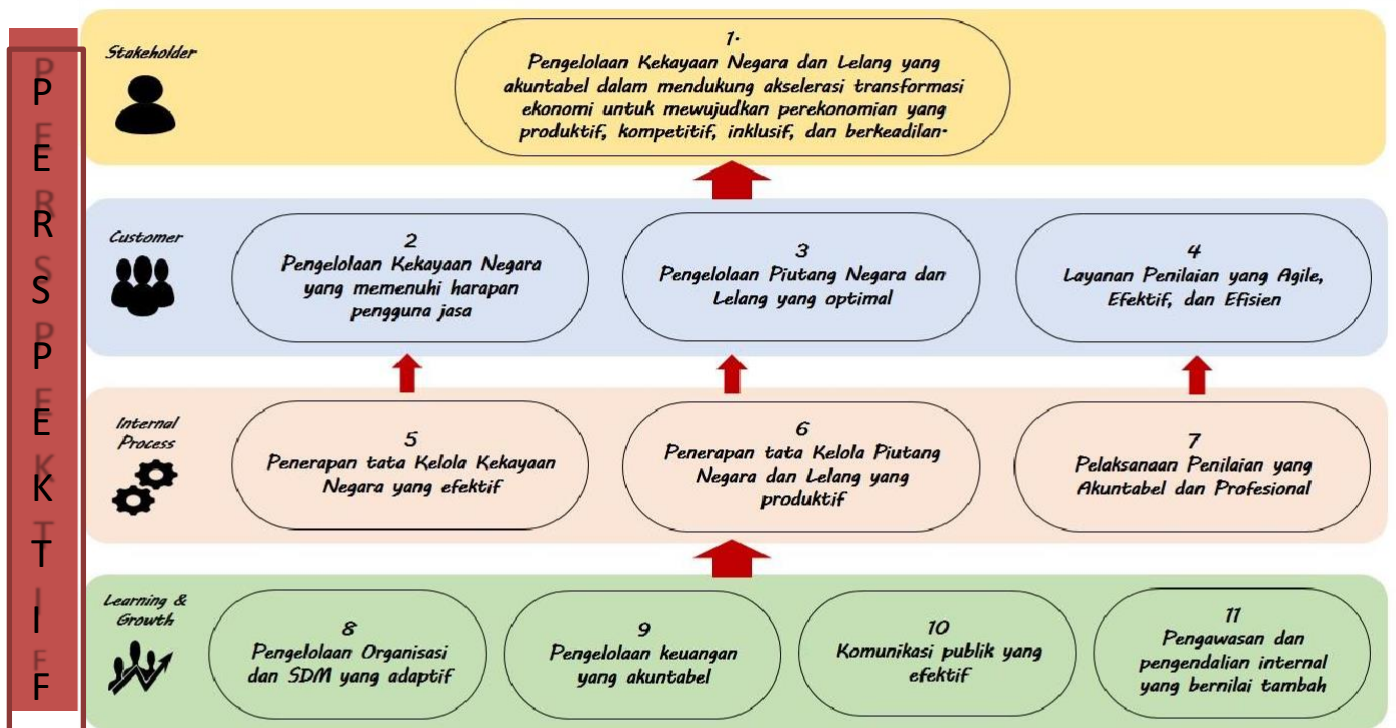
Ditandatangani secara elektronik
Dudung Rudi Hendratna





PERJANJIAN KINERJA NOMOR: PK-3/WKN.10/2024
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN 2024

PETA STRATEGI



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2024
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG
KEMENTERIAN KEUANGAN**

| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--|--|-------------------|
| 1 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. | 1a-CP Indeks Integritas | 89,17 |
| | | 1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 100 (Rp35,53M) |
| 2 | Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa | 2a-CP Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK | 71,5 |
| | | 2b-CP Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN | 86,5 |
| 3 | Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal | 3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang | 100 (Rp320M) |
| | | 3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | 100 (Rp2,05M) |
| 4 | Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien | 4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian | 70 |
| 5 | Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif | 5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | 100 |
| | | 5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | 100 |
| 6 | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif | 6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara | 92 (601BKPN) |
| | | 6b-CP Persentase produktivitas lelang | 89 |
| 7 | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional | 7a-CP Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian | 16 |
| 8 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | 8a-N Persentase dan pengembangan kompetensi pegawai | 90 |



| No. | Sasaran Program/Kegiatan | Indikator Kinerja | Target |
|-----|---|--|--------|
| | | 8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko | 85 |
| 9 | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel | 9a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 100 |
| | | 9b-CP Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN | 10 |
| 10 | Komunikasi Publik yang Efektif | 10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) | 80 |
| 11 | Pengawasan dan Pengendalian Internal yang bernilai tambah | 11a-N Indeks Efektivitas UKI | 82 |
| | | 11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM | 100 |

| Program/Kegiatan | Anggaran |
|---|---------------------------|
| Pengelolaan Perbendaharaan, Kekayaan Negara dan Risiko | Rp569.928.000,00 |
| 1. Komunikasi, Edukasi, dan Standardisasi | Rp19.400.000,00 |
| 2. Monev Perbendaharaan, Kekayaan Negara, dan Risiko | 0 |
| 3. Pengelolaan Aset | Rp550.528.000,00 |
| 4. Perumusan Kebijakan dan Keputusan Administratif | 0 |
| Program Dukungan Manajemen | Rp3.709.937.000,00 |
| 1. Legislasi dan Litigasi | Rp63.250.000,00 |
| 2. Pengelolaan Keuangan, BMN, dan Umum | Rp3.626.332.000,00 |
| 3. Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik | Rp10.250.000,00 |
| 4. Pengelolaan Risiko, Pengendalian, dan Pengawasan Internal | Rp10.105.000,00 |

Jakarta, 30 Januari 2024

Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan
Negara Jawa Timur

Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan
Lelang Malang



Ditandatangani Secara Elektronik
Tugas Agus Priyo Waluyo



Ditandatangani Secara Elektronik
Ridho Wahyon



**RINCIAN TARGET KINERJA
KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG MALANG
KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN 2024**

| Kode SS/IKU | SS dan IKU | Target | | | | | | |
|----------------|---|--------|-----|--------|-----|--------|-------|-------|
| | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 1 | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan | | | | | | | |
| 1a-CP | Indeks Integritas | - | - | - | - | - | 89,17 | 89,17 |
| 1b-CP | Persentase realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa | | | | | | | |
| 2a-CP | Tingkat kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK | - | 50 | 50 | 60 | 60 | 71,5 | 71,5 |
| 2b-CP | Tingkat Efektivitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN | - | 45 | 45 | - | 86,5 | 86,5 | 86,5 |
| 3 | Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal | | | | | | | |
| 3a-CP | Persentase Realisasi Pokok Lelang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3b-CP | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4 | Layanan Penilaian yang Agile, Efektif, dan Efisien | | | | | | | |
| 4a-CP | Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 5 | Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang efektif | | | | | | | |
| 5a-CP | Persentase Barang Milik Negara berupa tanah yang disertipikatkan | - | 40 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 |
| 5b-CP | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | 10 | 32 | 32 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 6 | Penerapan tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang produktif | | | | | | | |



| Kode SS/IKU | SS dan IKU | Target | | | | | | |
|----------------|--|--------|-----|--------|-----|--------|-----|-----|
| | | Q1 | Q2 | Smt. 1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 6a-CP | Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6b-CP | Persentase produktivitas lelang | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 89 | 89 |
| 7 | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional | | | | | | | |
| 7a-CP | Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 8 | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | | | | | | | |
| 8a-N | Persentase dan pengembangan kompetensi pegawai | 15 | 60 | 60 | 75 | 75 | 90 | 90 |
| 8b-N | Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 9 | Pengelolaan keuangan yang akuntabel | | | | | | | |
| 9a-CP | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 9b-CP | Persentase Deviasi Data PNBP Fungsional DJKN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 10 | Komunikasi publik yang efektif | | | | | | | |
| 10a-N | Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 11 | Pengawasan dan pengendalian internal yang bernilai tambah | | | | | | | |
| 11a-CP | Indeks Efektivitas UKI | - | - | - | - | - | 82 | 82 |
| 11b-N | Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM | - | - | - | - | - | 100 | 100 |



Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara
dan Lelang Malang,



Ditandatangani Secara Elektronik
Ridho Wahyono



**SASARAN KINERJA PEGAWAI
PENDEKATAN HASIL KERJA KUANTITATIF
BAGI PEJABAT PIMPINAN TINGGI DAN PIMPINAN UNIT KERJA MANDIRI**

KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

| PEGAWAI YANG DINILAI | | PEJABAT PENILAI KINERJA | | |
|-----------------------|---|----------------------------|---|------------------|
| NAMA | Ridho Wahyono | NAMA | Tugas Agus Priyo Waluyo | |
| NIP | 197101191998031001 | NIP | 196508281991031002 | |
| PANGKAT/ GOL RUANG | Pembina Tingkat I, IV/b | PANGKAT/ GOL RUANG | Pembina Utama Madya, IV/d | |
| JABATAN | Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Malang | JABATAN | Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur | |
| UNIT KERJA | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur | UNIT KERJA | Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur | |
| NO | RENCANA HASIL KERJA | INDIKATOR KINERJA INDIVIDU | TARGET | PERSPEKTIF |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| A. UTAMA | | | | |
| 1. | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur) | Indeks Integritas | 89,17 | Penerima Layanan |

| | | | | |
|----|--|--|------|------------------|
| 2. | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang Akuntabel dalam Mendukung Akselerasi Transformasi Ekonomi untuk Mewujudkan Perekonomian yang Produktif, Kompetitif, Inklusif dan Berkeadilan (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur) | Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 100 | Penerima Layanan |
| 3. | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur) | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan | 71,5 | Penerima Layanan |
| 4. | Pengelolaan Kekayaan Negara yang Memenuhi Harapan Pengguna Jasa (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur) | Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN | 86,5 | Penerima Layanan |
| 5. | Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur) | Persentase Realisasi Pokok Lelang | 100 | Penerima Layanan |
| 6. | Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang Optimal (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur) | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | 100 | Penerima Layanan |
| 7. | Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur) | Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian | 70 | Penerima Layanan |

| | | | | |
|-----|---|--|-----|----------------------------------|
| 8. | Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur) | Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan | 100 | Proses Bisnis |
| 9. | Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur) | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portfolio Aset) | 100 | Proses Bisnis |
| 10. | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur) | Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara | 92 | Proses Bisnis |
| 11. | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur) | Persentase Produktifitas Lelang | 89 | Proses Bisnis |
| 12. | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur) | Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian | 16 | Proses Bisnis |
| 13. | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif ((Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur) | Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko | 85 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 14. | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang Adaptif ((Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur) | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | 90 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 15. | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel | Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |

| | | | | |
|--------------------|---|--|-----|----------------------------------|
| | (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur) | | | |
| 16. | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur) | Persentase Deviasi Data PNBPFungsional DJKN | 10 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 17. | Komunikasi Publik yang Efektif (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur) | Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) | 80 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 18. | Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur) | Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) | 82 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| 19. | Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah (Penugasan dari Kepala Kantor Wilayah Jenderal Kekayaan Negara Jawa Timur) | Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM | 100 | Penguatan Internal atau Anggaran |
| B. TAMBAHAN | | | | |

| | | | | |
|-----------------------|--|---|--|--|
| PERILAKU KERJA | | | | |
| 1 | Berorientasi pelayanan | | | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat - Ramah, cekatan, solutif, dan dapat diandalkan - Melakukan perbaikan tiada henti | Ekspektasi Khusus Pimpinan: | | |
| | | Memberikan pelayanan sesuai dengan kebutuhan kepada seluruh pemangku kepentingan tanpa membeda-bedakan, bertindak berdasarkan kompetensi diri, dan senantiasa melakukan perbaikan dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan. | | |
| 2 | Akuntabel | | | |

| PERILAKU KERJA | | |
|----------------|--|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas dengan jujur, bertanggung jawab, cermat, disiplin, dan berintegritas tinggi - Menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. - Tidak menyalahgunakan kewenangan jabatan | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p> |
| 3 | Kompeten | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah - Membantu orang lain belajar - Melaksanakan tugas dengan kualitas terbaik | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Berdedikasi untuk senantiasa bekerja sesuai tugas dan tanggung jawab, mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki, serta bekerja secara efektif dan efisien dengan terus-menerus melakukan upaya pengembangan kompetensi diri.</p> |
| 4 | Harmonis | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya - Suka menolong orang lain - Membangun lingkungan kerja yang kondusif | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p> |
| 5 | Loyal | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Memegang teguh ideologi Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, setia pada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta pemerintahan yang sah - Menjaga nama baik sesama ASN, Pimpinan, Instansi, dan Negara - Menjaga rahasia jabatan dan negara | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Menjunjung dan mentaati nilai-nilai kebenaran dalam berbagai situasi, penuh tanggung jawab serta berani menyuarakan kebenaran guna menjaga nama baik institusi dan negara.</p> |
| 6 | Adaptif | |

| PERILAKU KERJA | | |
|----------------|---|--|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Cepat menyesuaikan diri menghadapi perubahan - Terus berinovasi dan mengembangkan kreativitas - Bertindak proaktif | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Melakukan peninjauan pekerjaan dan menerima masukan dalam upaya peningkatan kualitas kerja, serta proaktif mencari peluang perbaikan dengan memanfaatkan informasi terkini.</p> |
| 7 | Kolaboratif | |
| | <ul style="list-style-type: none"> - Memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumberdaya untuk tujuan bersama | <p>Ekspektasi Khusus Pimpinan:</p> <p>Bersikap positif & kooperatif dalam membangun kerjasama untuk mencapai hasil kerja yang terbaik berlandaskan keterbukaan serta sikap adil terhadap semua pihak tanpa membedakan derajat, hak, dan kewajiban.</p> |

Jakarta, 30 Januari 2024

Pegawai yang Dinilai,

Pejabat Penilai Kinerja,



Ditandatangani secara elektronik

Ridho Wahyono
197101191998031001



Ditandatangani secara elektronik

Tugas Agus Priyo Waluyo
196508281991031002



LAMPIRAN SASARAN KINERJA PEGAWAI
KEMENTERIAN KEUANGAN

PERIODE PENILAIAN: 1 Januari s.d. 31 Desember Tahun 2024

| DUKUNGAN SUMBER DAYA | | | | | | | | |
|--------------------------|---|--------|-----|-------|-----|--------|-------|-------|
| 1. | . 43 pegawai | | | | | | | |
| 2. | . Pegawai membutuhkan peralatan kerja antara lain komputer/laptop, alat tulis, dan lain-lain. | | | | | | | |
| SKEMA PERTANGGUNGJAWABAN | | | | | | | | |
| 1. | <i>Hasil kerja dilaporkan secara triwulanan</i> | | | | | | | |
| No | IKI | Target | | | | | | |
| | | Q1 | Q2 | Smt.1 | Q3 | s.d.Q3 | Q4 | Y |
| 1 | Indeks Integritas | - | - | - | - | - | 89,17 | 89,17 |
| 2 | Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3 | Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan Standar Barang dan Standar Kebutuhan | - - | 50 | 50 | 60 | 60 | 71,5 | 71,5 |
| 4 | Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan BMN | - | 45 | 45 | - | 45 | 86,5 | 86,5 |
| 5 | Persentase Realisasi Pokok Lelang | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|--|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 6 | Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 7 | Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| 8 | Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan | - | 40 | 40 | 60 | 60 | 100 | 100 |
| 9 | Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portfolio Aset) | 10 | 32 | 32 | 80 | 80 | 100 | 100 |
| 10 | Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Persentase Produktifitas Lelang | 30 | 45 | 45 | 60 | 60 | 89 | 89 |
| 12 | Persentase Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 13 | Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | 15 | 40 | 40 | 75 | 75 | 100 | 100 |
| 14 | Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 |
| 15 | Indeks Kualitas Pengelolaan Keuangan BA 15 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 16 | Deviasi Data PNBPFungsional DJKN | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10% |
| 17 | Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik (PPID) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 18 | Indeks Efektivitas Unit Kepatuhan Internal (UKI) | - | - | - | - | - | 82 | 82 |
| 19 | Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Pembangunan ZI-WBK/WBBM | - | - | - | - | - | 100 | 100 |
| KONSEKUENSI | | | | | | | | |
| 1. | <i>Apabila target kinerja tercapai maka diberikan penghargaan sesuai ketentuan yang berlaku.</i> | | | | | | | |

2.

Apabila target kinerja tidak tercapai maka diberikan pembinaan dan/atau sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 30 Januari 2024

Pejabat Penilai Kinerja,

Pegawai yang Dinilai,



Ditandatangani secara elektronik

Ridho Wahyono
197101191998031001



Ditandatangani secara elektronik

Tugas Agus Priyo Waluyo
19650828199103



LAMPIRAN II
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Unit Organisasi Eselon III KPKNL Malang
Tahun Anggaran 2024

| No. | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target | Realisasi | % |
|-----|--|---|--------|-----------|---------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. | Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang yang akuntabel dalam mendukung akselerasi transformasi ekonomi untuk mewujudkan perekonomian yang produktif, kompetitif, inklusif, dan berkeadilan. | 1a-CP Indeks Integritas Organisasi | 89,17 | 92,44 | 103,67% |
| | | 1b-CP Persentase Realisasi Penerimaan Negara dari Pengelolaan Kekayaan Negara dan Lelang | 100% | 134% | 134% |
| 2. | Pengelolaan Kekayaan Negara yang memenuhi harapan pengguna jasa | 2a-CP Tingkat Kesesuaian Penggunaan BMN dengan SBSK | 71,50% | 90,45% | 126,51% |
| | | 2b-CP Tingkat Efektifitas Tindak Lanjut Persetujuan Pengelolaan Kekayaan Negara | 86,50% | 93,96% | 108,62% |
| 3. | Pengelolaan Piutang Negara dan Lelang yang optimal | 3a-CP Persentase Realisasi Pokok Lelang | 100% | 150,49% | 150,49% |

| | | | | | |
|----|--|---|------|---------|---------|
| | | 3b-CP Persentase Penurunan Outstanding Piutang Negara | 100% | 243,20% | 243,20% |
| 4. | Layanan Penilaian yang Agile, Efektif dan Efisien | 4a-CP Indeks Ketepatan Waktu Penyelesaian Layanan Penilaian | 75 | 111 | 148% |
| 5. | Penerapan Tata Kelola Kekayaan Negara yang Efektif | 5a-CP Persentase Barang Milik Negara berupa Tanah yang Disertipikatkan | 100% | 113,11% | 113,11% |
| | | 5b-CP Persentase Evaluasi Kinerja BMN (Portofolio Aset) | 100% | 120,31% | 120,31% |
| | | 5c-CP Indeks Pelaksanaan Inventarisasi BMN eks BMN Idle | 100 | 100 | 120% |
| 6. | Penerapan Tata Kelola Piutang Negara dan Lelang yang Produktif | 6a-CP Persentase Saldo Berkas Kasus Piutang Negara (BKPN) | 92% | 71,74% | 122,03% |
| | | 6b-CP Persentase Produktivitas Lelang | 89% | 111,49% | 125,27% |
| 7. | Pelaksanaan Penilaian yang Akuntabel dan Profesional | 7a-CP Deviasi Ketergunaan Hasil Penilaian | 16% | 0% | 200% |

| | | | | | |
|-----|---|---|------|--------|---------|
| | | | | | |
| 8. | Pengelolaan Organisasi dan SDM yang adaptif | 8a-N Persentase Pengembangan Kompetensi Pegawai | 90 | 121,27 | 134,74% |
| | | 8b-N Indeks Kualitas Manajemen Kinerja dan Risiko | 85 | 98,27 | 115,61% |
| 9. | Pengelolaan Keuangan yang Akuntabel | 9a-CP Indeks Kinerja Kualitas Pelaksanaan Anggaran | 100% | 120% | 1250% |
| | | 9b-CP Persentase Deviasi Data PNBPN Fungsional DJKN | 10% | 0% | 200% |
| 10. | Komunikasi Publik yang Efektif | 10a-N Indeks Pengelolaan Layanan Informasi Publik | 80 | 100 | 125% |
| 11. | Pengawasan dan Pengendalian Internal yang Bernilai Tambah | 11a-CP Indeks Efektifitas UKI | 82 | 97,74 | 119,20% |
| | | 11b-N Tingkat Capaian Unit Kerja dalam Keberlanjutan Pembangunan ZI-WBK/WBBM | 100% | 105% | 105% |

Jumlah Anggaran Program Tahun 2024 : Rp4.236.104.000,-
Jumlah Realisasi Anggaran Program Tahun 2024 : Rp4.122.220.263,- (97,321%)